

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN DI KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO

AGHNES TRESYA MBAE  
MARTHA OGOTAN  
NOVIE R.A. PALAR

*Based on Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, article 5 paragraph (1) states that "Every citizen has the same right to obtain quality education", and article 11, paragraph (1) states "Government and Regional Government must provide services and facilities and guarantee the implementation of quality education for every citizen without discrimination. Basically Education aims to educate the life of the nation and improve human resources that are good and smart. In addition, education is expected to be able to improve the quality of life and can produce educated people who have faith, noble character, knowledge, skill, personality and responsibility. as mandated by the 1945 Constitution which requires the government to be responsible in educating the life of the nation and creating general welfare. This study uses a qualitative method adapted to the title and problem, the purpose of this study is to find out how policy implementation in this case the quality distribution of education in West Pamona District, Poso Regency, Central Sulawesi Province.*

*Keywords: Policy Implementation, Quality and Education Equity.*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia yang baik dan cerdas. Di samping itu, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu kehidupan serta dapat menghasilkan manusia terdidik yang beriman, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, berkepribadian dan bertanggung jawab. Adapun upaya perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia lebih baik. Pemerataan mutu pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan Pasal 11, Ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Masalah penting dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah kurangnya pemerataan pendidikan terutama di daerah terpencil. Pendidikan di Indonesia masih belum merata, ini terbukti dari adanya keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional dan keterbatasan anggaran.

## Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (Wahab, 2005:65) implementasi kebijakan didefinisikan sebagai memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2005:65) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

### **Konsep Pemerataan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama. Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun, Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya." Dan Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan

pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing

### **Konsep Mutu Pendidikan**

Ditinjau dari sudut pandang hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 (1 dan 4) yaitu : "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Husaini Usman : 2006 :7). Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan (Depdiknas, 2001:5). Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan mengintegrasikan input sekolah sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan mampu mendorong motivasi dan minat belajar. Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, dan moral kerjanya. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu input, proses dan output, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Sekolah yang bermutu adalah "sekolah yang secara keseluruhan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan (masyarakat)" (Margono, 2002). Untuk meningkatkan mutu sekolah diperlukan

dukungan kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen sekolah.

### **Konsep Pemerataan Mutu Pendidikan**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Program MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 (1): “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

### **Informan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Menurut Moleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala UPTD ( Unit pelaksana Teknis Dinas ) : 1 Orang
2. Kepala Sekolah TK,SD,SMP, SMA : 4 Orang
3. Tokoh Pendidikan : 2 Orang
4. Masyarakat : 3 Orang

### **Fokus Penelitian**

Pada dasarnya fokus dari penelitian ini dengan judul “Implementasi kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan di Kecamatan Pamona-Barat Kabupaten Poso”, berdasarkan pada Teori Jones (1996:166) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu : Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer ini adalah data yang di peroleh secara langsung yang berubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua atau data sekunder. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara melihat dan membaca.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Moleong (2006) metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan penelaan dokumen.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdam dan Biklen (Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian, bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana “implementasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso”. Fokus penelitian ini didefinisikan sebagai upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui tiga aktivitas utama kegiatan yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Pemberian kewenangan didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 ayat 1 huruf (f) Jika sebelumnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka dengan desentralisasi pendidikan

kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya dalam PP 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah terutama pasal 3 (a) bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu sebagai tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “yang kaya” maupun “yang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

### **Organisasi**

Peran aspek badan pelaksana dalam implementasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan di kecamatan Pamona Barat tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Poso selaku SKPD yang dipercayakan dalam implementasi pemerataan mutu pendidikan. Peran pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan guna tercapainya efektivitas implementasi kebijakan.

### **Interpretasi**

Faktor sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, karena banyak ditemukan kegagalan terhadap implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami betul kebijakan yang dihadapi terlebih apabila menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, para pelaksana dituntut memiliki keahlian, dedikasi dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan.

## **Aplikasi**

Pemerataan mutu pendidikan dilaksanakan untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi setiap lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, program yang dilaksanakan terlaksana namun ada yang menerima dan merespon dengan baik tapi ada juga yang kurang puas dengan sistem pembelajaran yang diberikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan pemerataan mutu pendidikan di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, ditarik kesimpulan :

#### 1. Organisasi

Dari hasil penelitian, kurangnya sumber daya tenaga pendidik yang ada di Kecamatan Pamona Barat sehingga ada beberapa sekolah yang siswanya banyak tetapi jumlah guru yang masih sangat minim sehingga terkadang proses pembelajaran tidak dapat terlaksana dengan baik. Bahkan banyak terdapat guru yang mengajar bukan pada bidang/jurusannya, contoh guru bahasa Indonesia merangkap mengajar matematika karena tidak adanya guru matematika di sekolah tersebut.

#### 2. Interpretasi

Kurang efektifnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana yang mengakibatkan pembuat kebijakan harus turun langsung memantau pelaksanaan implementasi kebijakan di sekolah-sekolah.

#### 3. Aplikasi

Prosedur pelaksanaan yang meliputi pelaksanaan serta penyediaan barang dan jasa guna menunjang kebijakan dibidang pendidikan, seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang masih kurang bahkan terdapat sekolah yang hanya mengandalkan satu ruang kelas untuk menampung siswa dalam proses belajar

mengajar serta terdapat bahan ajar yang sudah tidak layak pakai, dengan ini dapat diartikan bahwa pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana tidak terlaksana dengan baik berdasarkan program kerja dikarenakan kurangnya tenaga pengelolah.

## **Saran**

Guna tercapainya pemerataan mutu pendidikan di Kecamatan Pamona Barat, maka yang harus menjadi perhatian pemerintah :

1. Menambah kuota tenaga pendidik yang tersertifikasi serta mengajar sesuai keahlian yang dimiliki.
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang belajar seperti penambahan ruang belajar, mengupdate bahan ajar/buku pelajaran yang terbaru dan layak pakai.
3. Perhatian terhadap pengelolaan biaya operasional pada setiap sekolah dan harus dilaksanakan berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arif, R. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Agus, E dan Ratih, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Abidin, S. Z. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pancar Siwah.
- Abdul, W. S. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : BuminAksara.

- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Eka, R. 2007. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*
- Ihsanudin, E. 2010. *Definisi Peran Guru di Sekolah*. Jakarta.
- Ihsan, H. F. 2011. *Dasar-Dasar kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Martono, N. 2010. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2008. *Dinamika Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pasolong, H. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pidarta, M. 2007. *Landasan Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Paul Suparno. Dkk.2002. *Reformasi Pendidikan : Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sudarwan Danim.2006. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudiyono. 2009. *Regrouping Sebagai Upaya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik ( konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suhartono, Suparian. 2008. *Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan*. Yogjakarta: Ar Ruzz Media
- Sudrajad, Hari. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui i Implementasi KBK*. Bandung : Cipta Lekas Garafika. 2005.
- Usman Husaini. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: MedPres